



2024

RENCANA KERJA

DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN



 021 - 8093008

 @bkngoidofficial

 www.bkn.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN yang memuat rincian rencana pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 dalam upaya mendukung tercapainya sasaran pembangunan Manajemen ASN

Rencana Kerja yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Secara substansi, Renja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian untuk periode 1 (satu) tahun. Perumusan Rencana Kerja dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian agar terlaksana dengan lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kerja samanya dalam mewujudkan Renja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian semoga pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan berintegritas serta diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

DAFTAR ISI

01 KATA PENGANTAR

02 DAFTAR ISI

03 BAB I PENDAHULUAN

07 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA 2023

28 BAB III RENCANA KERJA 2024

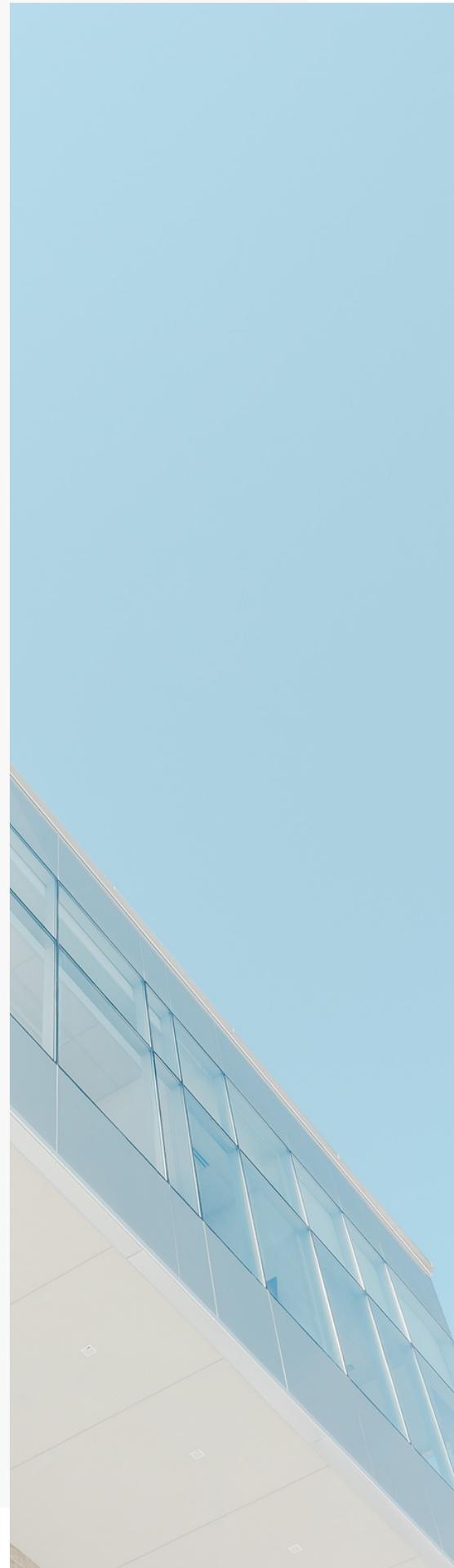
40 BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Pemerintah (Civil Service) merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan suatu negara. Peranan tersebut berupa sumber daya yang akan melaksanakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan suatu negara. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari Middle Income Trap. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.



Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2024 dan seiring dengan menurunnya angka kasus aktif COVID-19 memasuki fase transisi dari pandemi menuju endemi.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2024 ini mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sebagai salah satu bagian dari Badan Kepegawaian Negara, Kedeputan Bidang Mutasi Kepegawaian perlu merumuskan dan menyusun Rencana Kerja untuk mendukung upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

C. RUANG LINGKUP

Dalam Pasal 80 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN dibidang mutasi kepegawaian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Selanjutnya dalam Pasal 81 dinyatakan bahwa, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi Pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.

Sedangkan dalam Pasal 82 dinyatakan fungsi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
3. Perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan pejabat negara;
5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian selama Tahun 2024;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2024;
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA



A MISI

Mengacu pada Renstra Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2020-2024 Visi Deputy bidang Mutasi Kepegawaian yang merupakan turunan dari Visi BKN yakni “Mewujudkan Pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Selain itu misi Deputy bidang Mutasi Kepegawaian adalah “Penyelenggaraan Manajemen ASN”.

B TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas prima”.

C SASARAN STRATEGIS

Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian melaksanakan sasaran strategis ke 2 (dua) Badan Kepegawaian Negara yaitu: “Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima”. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian. Proses penyusunannya menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni customer perspective, internal process perspective, dan learn and growth perspective,

D. OVERVIEW KINERJA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS

TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS PRIMA

IKU 1 INDEKS KEPUASAN INSTANSI/PNS ATAS PELAYANAN KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
90	92	81,4	87,41	90,71

Indikator ini mengukur keberhasilan dan capaian kinerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terkait pencapaian sasaran pelayanan kepegawaian dan pengembangan manajemen kepegawaian ASN yang professional di bidang mutasi kepegawaian. Capaian sasaran strategis yang dituangkan dalam indeks kepuasan masyarakat (instansi atau PNS) yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kepegawaian dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian pengukuran kepuasan masyarakat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian didapatkan dari rata-rata capaian indikator utama Indeks Kepuasan Instansi/PNS atas Pelayanan Kepegawaian dari masing-masing Direktorat yang berada di bawah Kedeputusan Bidang Mutasi Kepegawaian.

Berdasarkan tabel diatas, jika membandingkan target dan realisasi tahun 2023 maka capaiannya sudah melebihi dari target yang ditentukan. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam tiga (3) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masyarakat secara umum merasa lebih puas dengan kondisi dan pelayanan yang mereka terima dari penyedia layanan dalam hal ini pelayanan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Berdasarkan survey, nilai persepsi tertinggi adalah indikator pengurusan tanpa biaya sedangkan faktor utama yang menjadi keluhan dari penerima layanan adalah pada indikator ketepatan waktu dan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan masih terdapat penyempurnaan pada sistem aplikasi sehingga terkadang menghambat proses pengusulan layanan kepegawaian. Selain itu proses migrasi ke SIASN juga mengakibatkan adanya beberapa

perubahan persyaratan pada beberapa jenis pelayanan. Contoh: pelayanan pensiun BUP Non KPP / Janda Duda Non KPP dulu diharuskan upload Super HD dan SKP namun di SIASN tidak diharuskan. Adanya beberapa pelayanan yang masih manual dan beberapa permasalahan membutuhkan klarifikasi serta proses sidang dalam proses penetapannya juga menjadi salah satu faktor penyebab indikator ketepatan waktu memiliki nilai persepsi yang rendah.

Terkait dengan hal tersebut, Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian akan melakukan inventaris atas error yang muncul pada aplikasi sebagai bahan masukan bagi pengembang aplikasi dalam proses penyempurnaan aplikasi kemudian akan dilakukan juga koordinasi dengan Direktorat PPSIASN untuk digitalisasi pelayanan yang masih manual agar pelayanan lebih cepat. Untuk meningkatkan pelayanan, Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian juga akan terus melakukan inovasi di tahun 2024 agar pelayanan kepegawaian menjadi lebih cepat dan target Indeks Kepuasan Masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan target. Namun disadari pula bahwa tingkat kepuasan masyarakat sangat ditentukan dengan kepentingan yang bersangkutan sehingga bersifat fluktuatif.

Namun demikian peningkatan nilai IKU Indeks Kepuasan Masyarakat di Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian menunjukkan bahwa walaupun terdapat pemotongan anggaran di tahun 2023, Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian tetap dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian telah melakukan efisiensi atas anggaran yang telah diberikan meski dengan jumlah anggaran yang lebih kecil dari seharusnya. Selain itu, terdapat efisiensi sumber daya manusia dimana meskipun dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi penurunan jumlah pegawai di Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian namun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kepegawaian meningkat, hal ini membuktikan bahwa jumlah pekerja yang menurun tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan Instansi/ PNS Atas Pelayanan Kepegawaian di Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian.

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PELAKSANAAN MANAJEMEN ASN

IKU 2 PERSENTASE PEMENUHAN PEDOMAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN MANAJEMEN ASN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
100	100	100	100	100

Pedoman kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja utama pemenuhan kebijakan pelaksanaan manajemen ASN adalah 100%, dengan output berupa 2 (dua) Draft Peraturan Badan Kepegawaian Negara, 1 (satu) Surat Edaran Kepala BKN, 6 (enam) Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian/ Surat Edaran Direktur. Pedoman kebijakan manajemen ASN yang dikeluarkan setiap tahun bergantung pada kondisi dan situasi pada tahun itu, sehingga perlu dilakukan prediksi pedoman kebijakan manajemen ASN yang akan dibutuhkan pada tahun depan.

Bentuk dari pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. adalah penetapan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terkait dengan bidang mutasi kepegawaian, yang terdiri dari:

- Draft Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS;
- Draft Revisi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Pengadaan PNS;
- Draft Surat Edaran Kepala BKN tentang petunjuk teknis pengakuan peningkatan pendidikan akademik bagi PNS;
- Surat Deputi Mutasi Nomor 833/B-MP.03.01/SD/D/2023 perihal Pengangkatan PNS bagi CPNS yang melebihi masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 8646/B-MP.03.02/SD/D/2023 perihal Pemanfaatan Aplikasi SIASN untuk Rekomendasi Penetapan Tewas;
- Surat Edaran Deputi Mutasi Nomor 0036/B-MP.03.01/SD/D/2024 perihal Pemanfaatan Aplikasi SIASN untuk Layanan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);

-
- Surat Nomor: 1840/B-MP.02.01/SD/DIII/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Ketentuan Tambahan Administrasi Pengesahan Fotokopi Surat Keputusan Pensiun;
 - Surat Nomor: 4324/B-MP.02.01/SD/D/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Percepatan Layanan Pensiun PNS dan Janda/Duda berbasis SIASN Integrasi dengan TOOS; dan
 - Surat Nomor: 5070/B-MP.01.01/SD/DIII/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Percepatan Administrasi Pengesahan Fotokopi Surat Keputusan Pensiun

Adapun bentuk pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN di Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan yang berbentuk draft dikarenakan penetapan Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan kewenangan Direktorat Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan hanya sebatas menyampaikan draft ketentuan tersebut kepada Direktorat Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, mengacu pada hasil diskusi LHE SAKIP dengan Biro Perencanaan dan Organisasi serta Inspektorat, terkait dengan nomenklatur IKU diatas yang semula berupa draft peraturan akan diubah mengikuti pedoman kebijakan sehingga linier/ konsisten dengan nomenklatur yang tertera di IKU tersebut maupun pada dokumen kinerja lainnya.

Selain itu terkait dengan kendala yang ditemui dalam pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN diantaranya yaitu beberapa instansi masih belum mengetahui terkait kebijakan tersebut sehingga masih ada beberapa yang mengajukan berkas manual dan belum memahami kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu kedepannya Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian akan melakukan publikasi Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di website dan media sosial official BKN.

Kemudian berdasarkan Rencana Target IKU Tahun 2023, pemenuhan IKU dokumen pedoman kebijakan ditargetkan terlaksana pada akhir tahun 2023 namun Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah melakukan pemenuhan seluruh pedoman kebijakan sebelum akhir tahun 2023 sehingga dapat dikatakan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah melakukan efisiensi waktu terhadap pemenuhan IKU dokumen pedoman kebijakan.

TERWUJUDNYA PELAYANAN BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN NSPK DAN SOP

IKU 3 PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN NSPK DAN SOP

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
100	100	184,12	107,88	103,24

Capaian atas indikator kinerja utama persentase penyelesaian bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP didapatkan dari rata-rata capaian indikator kinerja utama masing-masing Direktorat di bawah Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Berikut adalah jenis-jenis layanan dan capaian yang ada pada masing-masing Direktorat di bawah Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

Penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan nilai realisasi sebesar 103.24%. Rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Layanan	Target	Realisasi	Capaian
Penetapan NIP	98.197 NIP	96.657 NIP	98,43%
Penetapan Kenaikan Pangkat	128.100 Pertek/SK	140.850 Pertek/SK	109,95%
Penetapan Mutasi Lain-lain	55.744 Pertek/SK	59.300 Pertek/SK	106,38%

Penyelesaian pelayanan penetapan kenaikan pangkat dan penetapan mutasi lain-lain pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 109,95% untuk penetapan kenaikan pangkat dan sebesar 106,38% untuk penetapan mutasi lain-lain, Sementara itu untuk penetapan NIP, capaian penyelesaian pelayanan belum mencapai 100% sesuai target yang telah ditentukan.

Hal ini dikarenakan target penetapan NIP tahun 2023 ditentukan berdasarkan formasi CASN yang telah ditetapkan di tahun 2022, sementara realisasi penetapan NIP ditentukan berdasarkan penetapan NIP CASN yang diusulkan oleh instansi. Gap antara target dan realisasi penetapan NIP CASN disebabkan karena kosongnya beberapa formasi yang telah ditetapkan di tahun 2022. Formasi yang tidak terisi dapat disebabkan oleh ketidaktersediaan peserta yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi tersebut.

Pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, penyelesaian pelayanan bidang pensiun telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Rincian Kegiatan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	TA 2023
Penetapan Pertek Pensiun PNS	55.000	10.341	11.733	19.723	17.092	58.889
Penetapan Pertek Pensiun Duta Besar	15	1	12	1	2	16
Penerbitan SK Janda/Duda Pejabat Negara	130	42	40	60	39	181
Pengesahan salinan (legalisir) SK Pensiun	20.	54	31	11	10	106
Penetapan NPP/NPPN	50	17	21	7	17	62
Penetapan SK Pensiun Janda/Duda Taspen	450	121	85	109	96	411
Mutasi Keluarga (A2 Pens)	550	168	173	198	159	698
TOTAL	56.395	10.744	12.095	20.109	17.415	60.363

Berdasarkan tabel diatas Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara telah menyelesaikan 60.363 pertimbangan teknis dan surat keputusan dari target 56.395 di tahun 2023, sehingga capaian kinerja pada IKU 3 adalah 107,03%. Adanya kenaikan beban kerja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2023 terdapat banyak usulan pensiun TMT 2024 yang sudah diusulkan di tahun 2023. Disamping itu adanya usulan pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS), meninggal dan hukuman disiplin yang tidak diprediksi juga mengakibatkan peningkatan pada usulan pemberhentian di Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, telah diselesaikan:

- Perbaikan nama dan NIP SIASN : 6051 surat penetapan
- Penetapan tewas SIASN dan manual : 267 surat penetapan
- Perbaikan nama dan NIP manual : 334
- CLTN : 599 Nota Persetujuan
- CPNS > 1 th: 699 surat pertimbangan
- CPNS > 1th Status: 382 surat pertimbangan status kepegawaian.

Selain kendala - kendala diatas peningkatan beban kerja yang diakibatkan oleh kondisi yang tidak bisa diprediksi serta kendala teknis lainnya juga menjadi faktor yang menghambat pencapaian kinerja pada IKU ini. Contoh: Pada Direktorat Pensiun, dimana pengusulan awal pensiunnya adalah pemberhentian karena batas usia pensiun (BUP) namun di tengah prosesnya, ybs meninggal sehingga usulan pemberhentian tersebut harus diubah dan proses kembali dari awal yang membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian pada saat penyusunan rincian target IKU tahun 2023, perencanaan pembagian target per TW belum memperhatikan periode KP, seleksi dan kegiatan lainnya sehingga pada saat dilakukan pelaporan kinerja triwulan kerap kali capaian kinerja per triwulan tidak tercapai. Menindaklanjuti hal tersebut Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah berdiskusi dan melakukan penyusunan Rincian Target IKU Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing Direktorat.

Adapun efisien sumber daya dalam pemenuhan IKU tersebut diantaranya :

- 1.Efisiensi anggaran: Dengan anggaran yang telah dikurangi oleh Automatic Adjustment (AA) namun seluruh kegiatan dapat terlaksana.
- 2.Efisiensi Sumber Daya Manusia: Dengan jumlah pegawai yang menurun pada tahun 2023 namun beban kerja meningkat, target one day services maupun target kinerja tahunan terkait penyelesaian layanan kepegawaian dapat tercapai.
- 3.Efisiensi waktu dan proses: Dengan terdigitalisasinya layanan kepegawaian di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian maka durasi pengerjaan output menjadi semakin singkat karena proses pengerjaan yang semakin mudah yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

IKU 4 PERSENTASE TINGKAT KESALAHAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
0	0	0,008	0,051	0,029

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, semakin rendah tingkat kesalahan yang dilakukan semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2023 target persentase tingkat kesalahan adalah 0% dan realisasinya adalah 0,029%.

Persentase jumlah kesalahan penetapan layanan bidang mutasi kepegawaian diperhitungkan dari prosentase perbandingan jumlah permintaan perbaikan yang masuk ke Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan total jumlah penetapan. Pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, permintaan perbaikan tersebut diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dimana jika kesalahan terkait TMT Pensiun, Masa Kerja PNS dan besaran Gaji Pensiun merupakan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sedangkan diluar jenis tersebut seperti perbaikan nama, perbaikan NIP, dll merupakan kesalahan yang dilakukan oleh instansi dan tidak masuk kedalam perhitungan jumlah kesalahan dalam pemberian layanan kepegawaian bidang pensiun.

Pada tahun 2023 jumlah permohonan perbaikan yang masuk ke Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan adalah sejumlah 199 perbaikan dari total 293.251 penetapan. Kesalahan pada penetapan layanan sebagian besar disebabkan oleh data PNS yang tidak update, sehingga perlu dilakukan peremajaan, terkait hal tersebut Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan akan berkoordinas dengan instansi terkait peremajaan data PNS. Pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, setelah dilakukan identifikasi jenis kesalahan terdapat 12 perbaikan pertimbangan teknis dan Surat Keputusan dari total 60.363 penetapan. Sedangkan pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian jumlah kesalahan penetapan dihitung dari jumlah surat penetapan yang mendapatkan gugatan dan surat keputusan yang dicabut/ dibatalkan. Dalam tahun 2023 belum ada surat yang dikembalikan atau digugat.

Kedepannya Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian akan terus berkoordinasi dengan Instansi Pusat dan Daerah agar melakukan peremajaan data bagi data-data PNS yang belum valid. Peningkatan digitalisasi pada layanan mutasi kepegawaian juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam penetapan output layanan mutasi kepegawaian untuk menuju tingkat kesalahan 0% sesuai target renstra.

TERWUJUDNYA PENINGKATAN DIGITALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN MANAJEMEN ASN

IKU 5 PERSENTASE LAYANAN MANAJEMEN ASN YANG BERBASIS DIGITAL

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
90	90	73,33	70	75

Persentase jumlah pelayanan bidang mutasi kepegawaian yang semula dilakukan secara manual kemudian diubah menjadi pelayanan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan aplikasi digital. Pelayanan yang dimaksud terdiri dari:

1. Pengadaan CASN
2. Kenaikan Pangkat IV/b ke bawah
3. Kenaikan Pangkat IV/c ke atas
4. JF Utama (Pengangkatan/pemindahan/pemberhentian yang penetapannya menjadi kewenangan presiden)
5. Pencantuman Gelar
6. Kartu Pegawai
7. Pindah Instansi
8. Penugasan
9. Pengalihan
10. Peninjauan Masa Kerja
11. Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda dudanya
12. Mutasi Keluarga
13. Perbaikan nama dan NIP
14. Pelayanan SIASN untuk tewas
15. Pelayanan CLTN

Terdapat 15 dari total 20 layanan yang telah terdigitalisasi di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Target IKU presentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ditetapkan melebihi target tahun 2023 dikarenakan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengikuti target Kepala BKN yaitu 90%.

Tidak tercapainya target layanan manajemen ASN berbasis digital pada tahun 2023 ini disebabkan karena beberapa aplikasi masih dalam tahap pembangunan di Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian. Posisi Deputi bidang kepegawaian hanya sebagai pengguna aplikasi sedangkan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuat aplikasi layanan mutasi kepegawaian ada pada kedeputian SINKA.

Selain itu terdapat dua layanan kepegawain di Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara yakni layanan Pertimbangan Teknis Pejabat Negara dan SK Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara yang semula di tahun 2022 sudah terdigitalisasi melalui DocuDigital, namun dikarenakan adanya proses migrasi ke SIASN, pada tahun 2023 kedua layanan tersebut belum terakomodasi, baik secara digital maupun SIASN. Namun demikian, berdasarkan hasil diskusi dengan Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) diharapkan kedua layanan tersebut dapat terdigitalisasi dan terintegrasi dengan SIASN di tahun 2024. Adapun progress capaian untuk kedua layanan tersebut saat ini sudah memiliki tampilan dashboard yang sudah tersedia di SIASN dan masih on progress untuk penyempurnaannya.

Kedepannya Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian akan terus berkoordinasi dengan Kedeputian SINKA selaku unit yang berwenang untuk membuat dan mengembangkan aplikasi untuk terus menyempurnakan SIASN dan secara proaktif menyampaikan kendala error kepada tim SIASN untuk mendapatkan penyelesaian dengan segera. Adapun efisiensi sumber daya pada indikator ini mencakup:

- Efisiensi teknologi: Dimana dengan adanya teknologi berupa aplikasi layanan SIASN dapat menghasilkan output pekerjaan yang lebih tinggi dan efisien
- Efisiensi Sumber Daya Manusia: Dengan jumlah pegawai yang menurun pada tahun 2023 namun beban kerja meningkat, target one day services maupun target kinerja tahunan terkait penyelesaian output layanan kepegawaian dapat tercapai
- Efisiensi waktu dan proses: Dengan terdigitalisasinya layanan kepegawaian Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian maka durasi pengerjaan output menjadi semakin singkat karena proses pengerjaan yang semakin mudah yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

IKU PERSENTASE LAYANAN MANAJEMEN ASN YANG TERINTEGRASI DENGAN SIASN

Berdasarkan hasil diskusi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi, untuk IKU tersebut dihapuskan karena dianggap telah terakomodir dalam IKU 5 yaitu terkait layanan manajemen yang berbasis digital. Secara umum, layanan yang telah terdigitalisasi akan terintegrasi dengan SIASN sehingga untuk IKU tsb dianggap tidak relevan lagi.

TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

**IKU 6 TERSEDINYA DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN DI
LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN**

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
2	100%	2	2	2

Monitoring adalah upaya mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dilakukan dua kali dalam satu tahun. Kegiatan dilakukan pada bulan Juli dan Desember tahun 2023.

Berdasarkan hasil LHE SAKIP Inspektorat Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tahun 2023, untuk indikator IKU Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Kedepatian Bidang Mutasi Kepegawaian dianggap masih berbentuk output. Sehingga di tahun 2024 IKU tersebut akan diganti dengan IKU Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan target 100%

TERWUJUDNYA ASN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN YANG KOMPETEN, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

IKU 7 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
80	80	75,3	65,99	75,68

Pengukuran dan penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Dimensi kualifikasi memiliki bobot penilaian sebesar 25%. Dimensi kompetensi memiliki bobot penilaian sebesar 40%. Dimensi kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, dan dimensi disiplin memiliki bobot 5%. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, pegawai dianggap semakin profesional apabila memiliki tingkat kualifikasi pegawai yang tinggi, kompetensi yang diterima baik secara internal maupun eksternal yang memenuhi kompleksitas jabatannya dan semakin rendahnya tingkat pelanggaran disiplin.

Perolehan indeks profesionalitas dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Nilai IP 50 - 60, Kategori sangat rendah;
2. Nilai IP 61 - 70, Kategori rendah;
3. Nilai IP 71 - 80, Kategori sedang;
4. Nilai 81 - 90, Kategori tinggi; dan
5. Nilai 91 - 100, Kategori sangat tinggi.

Target IKU indeks profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ditetapkan melebihi target renstra 2024 dikarenakan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengikuti target Kepala BKN yaitu 80%. Capaian untuk IKU ini di tahun 2023 adalah 75,68%. dimana IKU ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini diakibatkan pada tahun 2023 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mulai melakukan kegiatan komunitas belajar di lingkungan pegawai serta mengimplementasikan pelatihan non klasikan lainnya berupa Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri.

Meskipun demikian masih disadari bahwa capaian IKU tersebut belum memenuhi dari target yang ditetapkan. Kendala yang ditemui antara lain rendahnya minat pegawai untuk meningkatkan kompetensi diri misalnya dengan mengikuti pelatihan, webinar maupun seminar secara daring maupun luring serta proporsi kualifikasi tingkat Pendidikan yang tidak seimbang di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Menyikapi hal tersebut kedepannya Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian disamping melakukan upaya dengan melaksanakan CMB dan Komunitas Belajar secara berkala, pada saat penyusunan kebutuhan pegawai Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian akan lebih memperhatikan kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang.

TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI INTERNAL DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

IKU 8 PERSENTASE PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI YANG TERSTANDAR DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
100	100	100	100	100

Sistem informasi sebagai sarana penunjang pelayanan kepegawaian harus handal, dan mudah diakses untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU terkait pemanfaatan sistem informasi yang terstandar selalu memenuhi target yang ditentukan. Hal ini juga didukung dengan hasil Survei Pemanfaatan Sistem Informasi dalam rangka mengukur tingkat pemanfaatan aplikasi/sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang dilakukan tiap semester dimana hasilnya adalah seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah memanfaatkan sistem informasi yang terstandar. Ukuran yang menggambarkan pemanfaatan system informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Sistem informasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Sistem Informasi	Aplikasi/ Website
1	Aplikasi presensi kehadiran	Location Based Presence
2	Aplikasi presensi	https://presensi.bkn.go.id/
3	Aplikasi kepegawaian	http://simpeg.bkn.go.id/
4	Aplikasi kinerja	https://kinerja.bkn.go.id/
5	Aplikasi pengelolaan barang inventory (SIONI)	http://sioni.bkn.go.id/
6	Sakti (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)	https://sakti.kemenkeu.go.id/
7	Aplikasi E-Monev Bappenas	https://e-monev.bappenas.go.id
8	SPEKTRA (Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan Terintegrasi)	https://spektra.bkn.go.id/
9	Aplikasi e-Travel	http://etravel.bkn.go.id/
10	Aplikasi digital signature	https://ds.bkn.go.id/
11	Aplikasi penyimpanan	https://loker.bkn.go.id/
12	Email BKN	https://email.bkn.go.id/
13	Srikandi	https://srikandi.arsip.go.id/

Pada IKU ini terdapat efisiensi waktu terutama dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Proses disposisi naskah masuk dan keluar yang sebelumnya manual menjadi lebih efisien dengan adanya penggunaan aplikasi SRIKANDI

TERWUJUDNYA BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI LAYANAN PRIMA

IKU 9 PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI RB DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
100%	100%	33,61	32,64	95,34%

Mengikuti arahan Biro Perencanaan dan Organisasi, pada tahun 2023 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengubah IKU Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menjadi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Adapun capaian untuk IKU ini pada tahun 2023 adalah 95,34% , terdapat 1 rencana aksi di lingkup Direktorat SKK yang belum berjalan yaitu pengaktifan kembali (belum dapat terlaksana dikarenakan proses integrasi SIASN dilakukan setelah SIASN CLTN selesai dibangun). Adapun rincian masing - masing Rencana aksi RB tiap Direktorat antara lain:

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan:

- Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang telah ditetapkan
- POS AP yang telah ditetapkan
- Laporan realisasi POS AP yang telah ditetapkan
- Layanan yang telah terintegrasi dengan SIASN
- Laporan Gratifikasi yang lengkap

Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara:

- Persentase pegawai yg menyampaikan pelaporan gratifikasi
- Persentase penyelesaian video branding One Day Service No Gratifikasi
- Tercantumnya FAQ Penyelesaian Pemberhentian Bagi PNS Yang Terlibat Tipikor dalam Website BKN
- Persentase pemenuhan Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
- Persentase pemenuhan SOP dan Surat Edaran layanan One Day Service
- Persentase SLA pelaksanaan One Day Service
- Persentase terintegrasinya Aplikasi TOOS dengan SIASN

Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian:

- Pembangunan aplikasi SIASN mengenai Tewas
- Pemenuhan Dokumen Kinerja dan Perencanaan Keuangan
- Pelayanan Informasi whatsapp callcenter
- Optimalisasi Pengisian SKM Pelayanan Kepegawaian Dit. SKK
- Penyederhaan POS Layanan Kepegawaian Dit. SKK
- Pembangunan aplikasi SIASN CLTN
- Penegakan Punishment
- Standarisasi Format Laporan Gratifikasi yang wajib dibawa saat perjalanan dinas

TERWUJUDNYA BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI LAYANAN PRIMA

IKU 10 SKOR ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
70	70	66,25	69,20	63,10

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah mengumpulkan dokumen-dokumen SAKIP pada tahun 2023 Deputi berupa:

1. Renstra tahun 2020 - 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Reform Tahun 2023
4. Manual IKU Tahun 2023
5. Rencana Aksi Tahun 2023
6. Laporan Capaian Kinerja triwulan I - IV Tahun 2023
7. Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2023
8. Laporan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2023
9. Laporan Kinerja Tahun 2022
10. Rencana Kerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mendapatkan skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 63,10 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22,80
Pengukuran Kinerja	30	21,00
Pelaporan Kinerja	15	10,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	8,50
Nilai Hasil Evaluasi		63,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Tingkat akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian memperoleh predikat B, yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Berikut ini adalah poin-poin yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil penilaian Inspektorat:

Perencanaan Kinerja

- Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat 1 IKU (IKU 6) yang bersifat output dan belum menggambarkan outcome yaitu "Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian" dengan target sejumlah 2 dokumen.
- Target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya realistis. Hal ini dilihat dari realisasi kinerja di tahun sebelumnya yang tidak tercapai namun terdapat peningkatan target kinerja di tahun berjalan
- Masih terdapat 1 IKU yang belum menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, dan tertuang secara berkelanjutan dalam satu periode renstra (unsustainable) yaitu Persentase layanan manajemen ASN yang terintegrasi dengan SIASN

- Terdapat target yang belum on the right track, yaitu pada IKU 5, Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital
- masih terdapat perbaikan/penyempurnaan kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan perbaikan/penyempurnaan target /indikator kinerja tidak disertakan Analisa perubahan/penjelasan pada dokumen perencanaan kinerja.

Pengukuran Kinerja

- Belum terdapat Sistem Operasional Prosedur tentang pengumpulan data kinerja untuk setiap IKU.
- Masih terdapat data kinerja yang belum relevan dan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dibuktikan dengan dijelaskan didalam Laporan Kinerja
- Pemahaman dan kepedulian hasil pengukuran kinerja Satuan kerja oleh setiap pegawai belum dapat dibuktikan.

Pelaporan Kinerja

- Laporan Laporan Kinerja yang disusun belum memenuhi kualitas pelaporan yang baik karena masih terdapat perbedaan sumber data
- Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja belum membandingkan dengan seluruh target jangka menengah (satu periode Renstra)
- Terdapat beberapa IKU pada Dokumen Laporan Kinerja yang belum menginformasikan kualitas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya baik anggaran dan/atau sumber daya manusia dalam mencapai kinerja sesuai target IKU yang telah ditetapkan
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja unit kerja/satuan kerja.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum disusun sesuai dengan standar dan belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, 13 yaitu belum sepenuhnya terdapat permasalahan/hambatan/kendala, rekomendasi (upaya perbaikan), dan tindak lanjut
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh komponen organisasi. Hal tersebut terlihat dari notulen evaluasi capaian kinerja yang belum dihadiri seluruh komponen organisasi dan belum sepenuhnya membahas seluruh IKU
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan analisa yang mendalam sehingga tidak dapat memberikan bukti konkret untuk peningkatan implementasi SAKIP

Menindaklanjuti perihal diatas, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah melaksanakan sharing session dengan Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi dengan hasil diskusi sebagai berikut:

- Pada Indikator Kinerja Utama 6 (Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian), IKU tersebut dianggap kurang sesuai karena masih berupa output belum bersifat outcome yang mana dampaknya belum diberikan atau dirasakan oleh pihak luar/umum. Terkait dengan hal tersebut Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah berdiskusi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk melakukan penggantian pada IKU tsb menjadi Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan target 100% dan telah tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan kinerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2024
- Pada Indikator Kinerja Utama 5 (Persentase Layanan ASN yang Berbasis Digital), target tahun 2023 pada IKU ini adalah 100, namun pada kenyataannya sampai dengan Desember tahun 2023 belum tercapai, terutama karena adanya proses migrasi SIASN di lingkungan Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang mengakibatkan dua (2) layanan yang sebelumnya sudah terdigitalisasi di tahun 2022 menjadi belum terdigitalisasi di 2023. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan diskusi lebih lanjut dengan tim Biro Perencanaan dan Organisasi terkait target IKU 5 tahun 2024 apakah dapat diturunkan atau disesuaikan mengingat kondisi existing saat ini kewenangan pembuatan aplikasi tidak berada di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

- Pada Indikator Kinerja Utama 7 (Indeks Profesionalitas ASN), sama halnya dengan IKU 5 diatas, target skor IP ASN tahun 2023 adalah 80 sedangkan capaian realisasinya 75,68. Mengingat kondisi tersebut diperlukan pula diskusi lebih lanjut dengan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait target IKU 7 apakah dapat diturunkan atau disamakan dengan tahun 2023.
- Pada tahun 2022 terdapat IKU “Persentase Layanan ASN yang terintegrasi dengan SIASN”, namun pada tahun 2023 IKU tersebut dihilangkan. Hal tersebut dikarenakan IKU tersebut sudah terakomodir di IKU 5 Tahun 2023 yaitu “Persentase Layanan ASN yang Berbasis Digital” dimana untuk layanan kepegawaian di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah terdigitalisasi pasti akan terintegrasi langsung ke dalam SIASN.
- Telah dilakukan penyusunan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian guna mendukung perubahan IKU 9 yang semula Indeks Pelaksanaa RB di lingkup Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menjadi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
- Terdapat beberapa target yang belum on the right track, dalam arti target di manual IKU tahunan namun di rencana aksinya semester. Menjadi catatan untuk kami agar lebih memperhatikan kesesuaian substansinya.
- Substansi Laporan Kinerja dan Rencana Kerja belum lengkap karena tidak dijelaskan terkait efisiensi sumber daya, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan satu periode Renstra, analisis keberhasilan, kendala yang dihadapi serta upaya tindak lanjut. Terkait dengan hal tersebut menjadi catatan untuk kami agar lebih baik lagi kedepannya

TERWUJUDNYA BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI LAYANAN PRIMA

IKU 11 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
100	100	99,20	99,75	99,56

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mampu melaksanakan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), mengalami automatic adjustmen sebesar Rp 455.250.000, 00 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 99,56% dengan jumlah RP 2.110.495.043,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah). Berikut adalah realisasi dari pagu anggaran masing- masing Direktorat:

Rincian Output	Realisasi Anggaran
Penetapan NIP	Rp. 104.426.956,-
Penetapan Kenaikan Pangkat	Rp. 177.634.983,-
Penetapan Mutasi Lainnya	Rp. 236.105.902,-
Koordinasi Teknis Pelayanan Penetapan NIP CASN dan Penetapan Kenaikan Pangkat	Rp. 166.514.000.-

Rincian Output	Realisasi Anggaran
Koordinasi Teknis Pelayanan Status dan Kedudukan Kepegawaian	Rp. 385.131.815.-
Penetapan/Pertimbangan SKK	Rp. 286.386.154.-
Nota Persetujuan CLTN dan Pertek Pengaktifan PNS	Rp. 84.736.415

Rincian Output	Realisasi Anggaran
Koordinasi Teknis Pelayanan Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Rp. 270.876.080,-
Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Rp. 383.470.162,-
Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara dan Surat Keputusan Pensiun janda/Duda Pensiunan PNS	Rp. 16.717.000,-

Kendala dalam pencapaian IKU persentase realisasi anggaran ini adalah adanya anggaran yang tidak terserap secara maksimal, seperti adanya anggaran untuk perjalanan dinas dan transport lokal yang belum terealisasi. Selain itu perencanaan target IKU yang belum proporsional sehingga ada beberapa capaian pada kinerja triwulan yang rendah. Namun demikian, pada IKU ini terdapat efisiensi anggaran, dimana dengan pagu anggaran yang berkurang dengan adanya pagu blokir, namun seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

IKU 12 PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT/PEMERIKSANAAN OLEH BPK/INSPEKTORAT DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Target		Capaian		
2023	2024	2021	2022	2023
100	100	100	100	88,89

Pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) temuan atas hasil audit/pemeriksaan oleh BPK di lingkungan Direktorat Pengadaan dan Kependidikan. Dari 9 (sembilan) temuan hasil audit tersebut, 6 (enam) temuan telah ditindaklanjuti dan dinilai sesuai, dan 3 (tiga) temuan sudah ditindaklanjuti namun belum dinilai sesuai.

BAB III RENCANA KERJA 2024

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi BKN, sebagaimana amanat dari Renstra BKN 2020-2024 maka Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dalam melaksanakan tupoksi di bidang mutasi kepegawaian harus secara jelas dan realistis dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia, teknologi, waktu dan kemampuan yang dimiliki.

Indikator meningkatnya perbaikan manajemen kepegawaian dapat dilihat dari semakin meningkatnya indeks profesionalitas pegawai sehingga efektivitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian, sistem pembinaan kinerja yang optimal, kualitas rumusan peraturan perundang-undangan kepegawaian, dan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Dalam mewujudkan pelayanan prima dibidang kepegawaian, mewujudkan manajemen internal diindikasikan oleh meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan kepegawaian dengan menggunakan metode pelayanan yang berbasis pada teknologi informasi dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, pengelolaan administrasi, penyediaan layanan informasi serta pemenuhan standar mutu sarana dan prasarana yang memadai. Untuk dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategiknya, maka setiap tujuan strategik harus ditetapkan sasaran strategik. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan indikator kinerjanya (performance indikator) yang jelas dan terukur. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui tantangan dan kendala dalam pelaksanaan serta hasil yang dicapai (outputnya).

SASARAN STRATEGIS

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menentukan sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi BKN sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan menggunakan metode balance scorecard (BSC), sasaran strategis yang akan dicapai tersebut dilihat dari 3 sudut pandang/perspektif yaitu:

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif pengguna layanan adalah terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif internal/proses bisnis adalah terwujudnya kebijakan pelaksanaan manajemen ASN, terwujudnya pelayanan bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP, terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, dan terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif ini adalah terwujudnya kebijakan pelaksanaan manajemen ASN, terwujudnya ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang kompeten, profesional dan berintegritas, Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima, dan Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel

B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2024

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari salah satu atau beberapa program. Indikator sasaran strategis Kedeputan Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

Indikator Kinerja Utama

IKU 1 Indeks Kepuasan Instansi/PNS atas Pelayanan Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
81,40	87,41	90,71	87	92

Indeks kepuasan masyarakat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Terlihat dari peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat, dimana pada tahun 2022 nilai indeks sebesar 87.41 kemudian meningkat menjadi 90.71 (rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat semester I dan II) pada tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh komitmen seluruh jajaran di Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian untuk selalu memperbaiki kinerja dan mengedepankan kualitas pelayanan selain itu meningkatnya digitalisasi layanan mutasi kepegawaian juga menjadi salah satu faktor tercapainya kinerja pada indikator ini. Per tahun 2023, capaian renstra atas indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai, dengan presentase pencapaian sebesar 100.79%, sehingga pada tahun 2023 Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian akan menyesuaikan target indikator indeks kepuasan masyarakat dengan target Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu sebesar 92.

Sebagai upaya meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat di tahun 2023, Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian telah menyusun beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Kedeputan SINKA selaku unit yang berwenang untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, untuk menciptakan sistem tracking yang dapat diakses oleh customer, tanpa melalui Biro Kepegawaian Instansi. Sehingga diharapkan customer dapat memantau sendiri progress penyelesaian usulan layanan mutasi kepegawaian yang diajukan;
- Berkoordinasi dengan Kedeputan SINKA selaku unit yang berwenang untuk mengembangkan aplikasi agar terus menyempurnakan serta meningkatkan performa SIASN sehingga layanan one day service dapat tercapai dengan optimal;

- Berkoordinasi dengan Kedeputusan SINKA selaku unit yang berwenang untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, untuk meningkatkan digitalisasi layanan status dan kedudukan, sehingga kecepatan pemberian pelayanan dapat ditingkatkan;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi whatsapp business pada layanan status dan kedudukan untuk mempermudah berbagi informasi dengan customer.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kebijakan pelaksanaan manajemen ASN

IKU 2 Persentase pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum capaian indikator kinerja utama pemenuhan kebijakan pelaksanaan manajemen ASN pada tiga (3) tahun terakhir adalah 100%. Dalam prosesnya, salah satu faktor keberhasilan dalam indikator terkait pedoman kebijakan adalah keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan kebijakan, termasuk pihak internal dan eksternal sehingga dipastikan bahwa pedoman kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan telah sesuai dengan arah strategis organisasi.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi IKU ini adalah dengan membuat rencana penyusunan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pada tahun itu dan pembuatan draft pedoman kebijakan dilakukan pada secepat mungkin, sehingga pada akhir tahun seluruh pedoman kebijakan telah terealisasi. Pada tahun 2024 direncanakan pedoman kebijakan yang akan dikeluarkan adalah sebagai berikut:

-
- Penyusunan pedoman kebijakan terkait pelayanan bidang pengadaan dan kepegawaian. Prediksi pedoman kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Kepala BKN terkait Karis/Karsu Virtual; dan
2. Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi terkait Pengadaan CASN.

- Penyusunan pedoman kebijakan terkait pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara. Prediksi pedoman kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian perihal Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Seluruh Pejabat Negara Yang Diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
2. Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian perihal usulan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara Melalui SIASN; dan
3. Peraturan BKN perihal Penetapan Pensiun Otomatis yang di dalam rancangan tersebut disebutkan bahwa tidak melampirkan DPCP.

- Penyusunan pedoman kebijakan terkait pelayanan bidang status dan kedudukan kepegawaian. Prediksi pedoman kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi tentang Pemanfaatan Layanan SIASN Pengaktifan Kembali; dan
2. Perubahan peraturan cuti PPPK/ PNS.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya pelayanan bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP

IKU 3 Persentase penyelesaian bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
184,12%	107,88%	103,24%	100%	100%

Secara umum terlihat bahwa realisasi dalam tiga (3) tahun terakhir selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk mengedepankan kualitas layanan dengan implementasi "One Day Services" menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini. Selain itu sinergisitas antara Instansi dan unit - unit kerja di Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian mulai dari proses pengusulan, proses penetapan dan penerbitan output juga berjalan dengan baik sehingga layanan kepegawaian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Namun demikian, masih menjadi catatan untuk kami bahwa Indikator Penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022 realisasi capaian indikator penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian adalah sebesar 107.88%, realisasi yang terlalu tinggi tersebut mengindikasikan bahwa jumlah target yang ditentukan pada tahun 2022 kurang tepat, sehingga pada tahun 2023 ini jumlah target ditentukan sedemikian rupa agar realisasi IKU tersebut berada di bawah 120%.

Disamping itu Deputy Mutasi Kepegawaian juga telah melakukan penyusunan rincian target IKU tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kegiatan di masing - masing unit kerja dan telah memperhatikan pembagian target per triwulannya. Kedepannya juga akan dilaksanakan rapat monitoring

dan evaluasi kinerja per triwulan yang dihadiri oleh setiap pegawai sehingga tiap pegawai memiliki informasi yang sama terkait capaian kinerja maupun permasalahan-permasalahan terkait layanan kepegawaian di unitnya.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya pelayanan bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP

IKU 4 Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
0,008	0,051	0,029	0%	0%

Pada tahun 2023 target persentase tingkat kesalahan adalah 0% dan realisasinya adalah 0,010% yang artinya bahwa masih terdapat kesalahan dalam penetapan pelayanan mutasi kepegawaian, hal tersebut menjadi catatan penting bagi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini diakibatkan karena masih terdapat data ASN yang tidak valid sehingga perlu dilakukan perbaikan pada output layanan yang telah ditetapkan. Untuk memperbaiki hal tersebut Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terus berkoordinasi dengan Instansi Pusat dan Daerah agar melakukan peremajaan data bagi data-data PNS yang belum valid. Peningkatan digitalisasi pada layanan mutasi kepegawaian juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam penetapan output layanan mutasi kepegawaian untuk menuju tingkat kesalahan 0% sesuai target renstra 2024.

Disamping itu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga akan melakukan Komunitas Belajar secara berkala untuk membahas berbagai kasus/permasalahan kepegawaian sehingga kesalahan pada saat mengerjakan usulan layanan kepegawaian dapat terminimalisir.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN

IKU 5 Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
62,5%	70%	75%	77%	90%

Target IKU presentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ditetapkan melebihi target renstra 2024 dikarenakan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengikuti target Kepala BKN yaitu 95%. Untuk selanjutnya pada tahun 2024, Kedeputan Bidang Mutasi Kepegawaian tidak mengubah target untuk IKU layanan manajemen ASN berbasis digital yaitu 90% karena pada tahun 2023 target tersebut belum tercapai dimana pada tahun 2023 capaian indikator digitalisasi layanan adalah 75%. Belum semua layanan manajemen ASN telah terdigitalisasi pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena beberapa aplikasi masih dalam tahap pembangunan di Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian. Posisi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian hanya sebagai pengguna aplikasi sedangkan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuat aplikasi layanan mutasi kepegawaian ada pada Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengajukan proses bisnis layanan kepada Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian, agar Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian dapat membangun aplikasi yang dibutuhkan.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga berkoordinasi dengan Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian agar progress penyelesaian aplikasi tersebut dapat termonitor dengan baik dan dapat segera terselesaikan. Pada tahun 2024 layanan manajemen yang telah diajukan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian untuk didigitalisasi adalah sebagai berikut:

1. Kartu Istri dan Kartu Suami;
2. Mutasi Lain ;
3. Pertimbangan Teknis Pejabat Negara;
4. SK Janda/Duda Pejabat Negara; dan
5. Pengaktifan Kembali

Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pada tahun 2024 untuk meningkatkan realisasi indikator kinerja utama persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder eksternal dan internal. Dalam rangka pembangunan dan pengembangan aplikasi SIASN guna meningkatkan digitalisasi layanan, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terus melakukan kolaborasi dengan Kedeputusan Bidang Sistem Informasi Kepegawaian selaku pengembang aplikasi SIASN. Selain itu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga berkolaborasi dengan instansi pusat dan daerah selaku pengguna aplikasi SIASN
- Melakukan percepatan layanan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya Percepatan layanan kepegawaian diharapkan dapat menekan digitalisasi layanan tersebut untuk terus ditingkatkan, karena adanya tuntutan untuk terus memenuhi kebutuhan PNS dalam mendapatkan layanan manajemen PNS yang cepat, tepat, dan transparan
 - Menyiapkan bahan (draft SK, contoh template, dll) sebagai referensi dalam penyempurnaan aplikasi serta pembuatan timeline / rencana kerja pembuatan aplikasi

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

IKU 6 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
2	2	2	2	100%

Monitoring adalah upaya mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Dalam tiga (3) tahun terakhir, realisasi capaian indikator berikut selalu memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam memberikan feedback terkait penyelenggaraan rapat monitoring dan evaluasi di lingkup Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Adanya transparansi dalam penyajian data serta komunikasi yang terbuka dan efektif juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mencapai IKU tersebut.

Namun demikian, meskipun kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik, masih menjadi catatan untuk kami bahwa di lingkup Kedeputian Mutasi Kepegawaian IKU tersebut hasilnya masih bersifat output dan belum bersifat outcome. Adapun terkait hal tersebut, telah diadakan sharing session antara Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian dengan Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait perubahan nomenklatur atas IKU tersebut dimana diharapkan hasilnya dapat bersifat outcome.

Berdasarkan hasil sharing session tersebut, telah dilakukan diskusi dengan pihak Biro Perencanaan dan Organisasi, sehingga pada tahun 2024 IKU 6 yang semula "Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian" berubah menjadi "Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian." dengan target 100%.

Dengan demikian diharapkan hasil capaian atas indikator tersebut dapat lebih terukur dan memudahkan evaluasi kedepannya. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga akan menggunakan hasil sharing session LHE SAKIP dengan Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi tersebut sebagai referensi dalam menyusun laporan perencanaan dan pelaporan kinerja kedepannya.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang kompeten, profesional, dan berintegritas

IKU 7 Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
75,3	65,99	75,68	79	80

Target IKU indeks profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ditetapkan melebihi target renstra 2024 dikarenakan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengikuti target Kepala BKN yaitu 80%. Kemudian pada tahun 2024 Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian kembali menetapkan target 80, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dengan target yang sama belum tercapai.

Namun demikian pada tahun 2023, indeks profesionalitas Deputi Bidang Mutasi Kepegawain mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2022. Pada tahun 2022, indeks profesionalitas Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan adalah sebesar 65,99 sedangkan pada tahun 2023 ini naik menjadi 75,68 atau sebesar 9.69 poin. Hal ini diakibatkan pada tahun 2023 Deputi Bidang Mutasi Kepegawain mulai melakukan kegiatan komunitas belajar di lingkup masing - masing Direktoratny.

Kegiatan komunitas belajar ini merupakan sharing session bagi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawain untuk menambah pengetahuan dan menyamakan persepsi, sehingga pengembangan kompetensi pegawai tetap dapat dilakukan. Selain melakukan kegiatan komunitas pelatihan non klasikal lainnya yaitu CMB (coaching, mentoring dan belajar mandiri) juga kerap dilakukan dan dilakukan pelaporan rutin pelaksanaannya ke Biro SDM.

Kemudian, disamping melakukan upaya dengan melaksanakan CMB, pada saat penyusunan kebutuhan pegawai akan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang sehingga proporsi kualifikasi tingkat Pendidikan yang tidak seimbang dalam unit kerja dapat terminimalisir.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

IKU 8 Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian berguna untuk menyelaraskan sistem informasi dengan yang ada di BKN serta untuk mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU terkait pemanfaatan sistem informasi yang terstandar selalu memenuhi target yang ditentukan. Hal ini juga didukung dengan hasil Survei Pemanfaatan Sistem Informasi yang dilakukan pada ketiga Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dimana hasilnya adalah seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah memanfaatkan sistem informasi yang terstandar. Keberhasilan tercapainya indikator ini dikarenakan partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk menggunakan sistem informasi standar yang disediakan oleh BKN. Sosialisasi yang efektif terkait manfaat dan cara penggunaan sistem informasi terstandar turut meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna yang dalam hal ini adalah pegawai di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima

IKU 9 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Mutasi

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
33,61	32,62	95,34%	35	100%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 – 2024 dan selaras dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 465 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 178/KEP/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020 – 2024, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga telah melakukan penyusunan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB pada masing- masing Direktorat dan telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi.

Kemudian mengikuti arahan Biro Perencanaan dan Organisasi, pada tahun 2023 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengubah IKU Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menjadi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan target 100%.

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pada tahun 2023 untuk mencapai target renstra 2024 adalah sebagai berikut:

- Membentuk tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2024
- Mendokumentasikan setiap kegiatan yang dapat dijadikan evidence untuk penilaian Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;

- Mengumpulkan dokumen evidence Reformasi Birokrasi pada satu drive;
- Menyusun rencana kerja dan monitoring evaluasi pada seluruh POKJA;
- Menyusun Standar Kompetensi Jabatan.

Disamping itu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga berkomitmen dalam melaksanakan Rencana Aksi RB General BKN Tahun 2023 – 2024 yaitu:

1. Tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dan proses transformasi jabatan fungsional untuk mendukung kinerja lintas unit, K/L/D (RB Tematik);
2. Menyelenggarakan layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN (Integrasi layanan purnabakti ke dalam SIASN);
3. Menyelenggarakan layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN (Integrasi layanan perekrutan dan seleksi ke dalam SIASN); dan
4. Menyelenggarakan layanan kepegawaian berbasis digital melalui SIASN (Integrasi layanan promosi rotasi dan karir ke dalam SIASN)

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima

IKU 10 Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
66,25	69,2	63,1	67	70

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menetapkan target 2022 melebihi target renstra 2022 (senilai 66) dikarenakan pada tahun 2021 realisasi IKU hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah melampaui target tersebut, dengan nilai 66.25, sehingga pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 67 sengan capaian realisasi tahun 2022 adalah 69,2, namun demikian terlihat penurunan capaian realisasi pada tahun 2023 menjadi 63,1. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria maupun teknis

penilaiannya. Dimana evaluasi tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada tingkat unit kerja maupun satuan kerja sehingga hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan. Adapun jika meninjau dari capaian pada tahun 2023 yang belum mencapai target yang ditentukan, Kedeputusan Bidang Mutasi Kepegawaian pada tahun 2024 akan menetapkan target nilai hasil evaluasi akuntabilitas yang sama dengan tahun 2023 yaitu 70, dengan penetapan target yang realistis diharapkan Kedeputusan Bidang Mutasi Kepegawaian dapat mencapai target di tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Deputi Bidang Mutasi di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring pencapaian target jangka menengah sampai dengan tahun berjalan;
- Melakukan evaluasi terhadap permasalahan untuk IKU;
- Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja;
- Menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting pada Laporan Kinerja
- Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya sampai dengan jangka menengah dan perbandingan lain yang diperlukan;
- Melampirkan evidence dalam Laporan Kinerja;
- Menyusun laporan capaian kinerja dengan analisis yang memadai.

SASARAN STRATEGIS

Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel

IKU 11 Persentase realisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
99,20%	99,75%	99,56%	87%	100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat penurunan dalam capaian realisasi anggaran dari tahun 2022 sebesar 0,19%. Penurunan realisasi anggaran pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya anggaran perjalanan dinas dan transport lokal yang belum terealisasi . Sebagai upaya peningkatan capaian IKU realisasi anggaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di tahun 2024, akan melakukan strategi sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan realisasi anggaran lebih detail lagi untuk tahun selanjutnya;
- Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
- Mempercepat proses pencairan dengan melakukan tertib administrasi pada proses penyusunan dokumen keuangan

SASARAN STRATEGIS

Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel

IKU 12 Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Realisasi			Target	
2021	2022	2023	Renstra 2024	Renja 2024
100	100	88,89	100	100

Pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) temuan atas hasil audit/pemeriksaan oleh BPK di lingkungan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Dari 9 (sembilan) temuan hasil audit tersebut, 6 (enam) temuan telah ditindaklanjuti dan dinilai sesuai, dan 3 (tiga) temuan sudah ditindaklanjuti namun belum dinilai sesuai.

Ketiga temuan yang masih perlu ditindaklanjuti disebabkan oleh Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS yang tidak selaras dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS. Sehingga dinilai perlu untuk ditetapkannya Peraturan BKN tentang Petunjuk Teknis Pengadaan ASN. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah melakukan sejumlah tindaklanjut atas temuan tersebut antara lain:

-
- Membuat inventaris atas hal-hal yang perlu diubah dari Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
 - Menyusun Draft Revisi Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
 - Menyampaikan Draft Revisi Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS kepada Direktorat Perundang-Undangan untuk mendapat review dan tindaklanjut sebagaimana mestinya.

Upaya yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2024 untuk meningkatkan IKU Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Direktorat Peraturan Perundang-Undangan terkait review dan tindaklanjut atas draft revisi Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 yang telah dikirimkan; dan
- Memberikan saran dan masukan kepada Direktorat Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2020-2024, perubahan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Tahun 2024 ini merupakan acuan bagi unit eselon II mandiri di lingkungan Kedeputusan Bidang Mutasi Kepegawaian dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2024 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.



LAMPIRAN

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENETAPAN/PERTIMBANGAN STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 2024**

Kode	Uraian Suboutpu/komponen/ subkomponen/de l	Volume Sub Ouput	Rincian Perhitungan		Harga satuan	Jumlah
				Sat Jum		
1	2	3	4	5	6	7
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					805.000.000
4.846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN					805.000.000
4846.AEA.003	Koordinasi Teknis Pelayanan Status dan Kedudukan Kepegawaian	2 Kegiatan				369.698.000
051	Persiapan dan Perencanaan					1.694.000
A	Koordinasi Teknis Pelayanan Status dan Kedudukan					1.694.000
521211	Kepegawaian Belanja Bahan					1.694.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 22 ORG x 1 KL		22 ORG x 1 KL	22	53.000	1.166.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 22 ORG x 1 KL		22 ORG x 1 KL	22	24.000	528.000
052	Pelaksanaan					366.310.000
A	Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan status dan kedudukan kepegawaian di Wilayah Kerja Kanreg X BKN Bali					123.446.000
521211	Belanja Bahan					24.000.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Seminar Kit		1 PKT	1	24.000.000	24.000.000
	a handbag		80 buah x 1 Pkt	80	160.000	12.800.000
	b Powerbank		80 buah x 1 Pkt	80	140.000	11.200.000
521213	Belannja Honor output					1.900.000
	kegiatan (KPPN.088-Jakarta III)					
	- Ketua 1 ORG x 1 KEG		1 org x 1	1	400.000	400.000
	- Sekretaris 1 ORG x 1 KEG		keg 1 org x	1	300.000	300.000
	- Anggota 4 ORG x 1 KEG		1 keg 4 org x 1 keg	4	300.000	1.200.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Mee ng Luar Kota					97.546.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan dinas		1 PKT	1	61.000.000	61.000.000
	- Paket fullday Eselon I dan II		6 ORG x 1 PKT x 1 KEG	6	652000	3.912.000
	- Paket fullday Eselon III kebawah		74 ORG x 1 PKT x 1 KEG	74	441000	32.634.000
B	Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan status dan kedudukan kepegawaian di Wilayah Kerja Kanreg III BKN Bandung					117.864.000
521211	Belanja Bahan					30.000.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Seminar Kit		1 PKT	1	30.000.000	30.000.000
	a handbag		100 buah x 1 Pkt	100	160.000	16.000.000
	b Powerbank		100 buah x 1 Pkt	100	140.000	14.000.000
521213	Belannja Honor output					1.900.000
	kegiatan (KPPN.088-Jakarta III)					
	- Ketua 1 ORG x 1 KEG		1 org x 1	1	400.000	400.000
	- Sekretaris 1 ORG x 1 KEG		keg 1 org x	1	300.000	300.000
	- Anggota 4 ORG x 1 KEG		1 keg 4 org x 1 keg	4	300.000	1.200.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Mee ng Luar Kota					85.964.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan dinas		1 pkt x 1 keg	1	35.000.000	35.000.000
	- Paket Fullday Eselon I dan II		6 ORG x 1 PKT x 1 KEG	6	692.000	4.152.000
	- Paket Fullday Eselon III ke bawah		94 ORG x 1 PKT x 1 KEG	94	498.000	46.812.000
C	Perjalanan Dinas Pimpinan					125.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					125.000.000

	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan Dinas Depu Bidang Mutasi Kepegawaian		1 PKT	1	125.000.000	125.000.000
	a Denpasar					
	Eselon I					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	480.000	1.440.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	5.478.000	10.956.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	5.305.000	5.305.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	200.000	600.000
	b Jogja					
	Eselon I					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	420.000	1.260.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	5.017.000	10.034.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	4.107.000	4.107.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	200.000	600.000
	c Medan					
	Eselon I					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	4.960.000	9.920.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	7.252.000	7.252.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	200.000	600.000
	Eselon III Gol.IV					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3hr	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	1.100.000	2.200.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	3.440.000	3.440.000
	* Taxi PP		1 org x 2 kl	2	512.000	1.024.000
	d Kab. Manggarai					
	NTT Eselon I					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	430.000	1.290.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	3.750.000	7.500.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	9.413.000	9.413.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	200.000	600.000
	Eselon III					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3hr	3	430.000	1.290.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	1.355.000	2.710.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	4.871.000	4.871.000
	* Taxi PP		1 org x 2 kl	2	372.000	744.000
	e Bandung					
	Eselon I					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	430.000	1.290.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	5.381.000	10.762.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	600.000	600.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	200.000	600.000
	f Manado					
	Eselon I					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr 1	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		org x 1 kl x 2 mlm	2	4.919.000	9.838.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	10.824.000	10.824.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	200.000	600.000
053	Pelaporan					1.694.000
A	Evaluasi Koordinasi Teknis Pelayanan Status dan Kedudukan Kepegawaian					1.694.000
521211	Belanja Bahan					1.694.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa		22 ORG x 1 KL	22	53.000	1.166.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa		22 ORG x 1 KL	22	24.000	528.000

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENETAPAN/PERTIMBANGAN STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 2024

Kode	Uraian Suboutpu/komponen/ subkomponen/de l	Volume Sub Ouput	Rincian Perhitungan		Harga satuan	Jumlah
				Sat Jum		
1	2	3	4	5	6	7
4846.BAB.004	Penetapan/Per mbangan Status dan Kedudukan Kepegawaian	624 lembaga				309.204.000
051	Persiapan dan Perencanaan					249.914.000
A	Penetapan/Per mbangan Kedudukan Kepegawaian					176.526.000
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)					3.388.000
	- Biaya Makan Rapat Biasa 22 ORG x 2 KL		22 ORG x 2	44	53.000	2.332.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 22 ORG x 2 KL		KL 22 ORG x 2 KL	44	24.000	1.056.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.088-Jakarta III)					45.000.000
	- ATK dan Bahan Komputer		1 PKT	1	35.325.000	35.325.000
	aKertas A4 80gr		15 rim x 1 pkt	15	66.000	990.000
	bKertas F4 80gr		15 rim x 1 pkt	15	69.000	1.035.000
	cToner Printer Laserjet HP 80a		6 dus x 1 pkt	6	1.700.000	10.200.000
	dToner Printer Laserjet HP 78a		5 dus x 1 pkt	5	1.100.000	5.500.000
	eToner Printer Laserjet HP 05a		5 dus x 1 pkt	5	1.750.000	8.750.000
	fToner Printer Laserjet HP 83a		5 dus x 1 pkt	5	1.100.000	5.500.000
	gToner Printer Laserjet HP 85a		2 dus x 1 pkt	2	1.308.000	2.616.000
	hBalliner biru		1 lusin x 1 pkt	1	140.000	140.000
	iBallpoint signo biru		2 lusin x 1 pkt	2	220.000	440.000
	jBallpoint snowman 0,7 hitam		2 lusin x 1 pkt	2	45.000	90.000
	kTrigonal Clip		4 dus x 1 pkt	4	16.000	64.000
	- Pengadaan Sampul Takah		450 buah x 1 pkt	450	13.000	5.850.000
	- Pengadaan Plas k Sampul Takah		450 buah x 1 pkt	450	8.500	3.825.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.088-Jakarta III)					3.000.000
	- Uang Transport dalam kota 2 Org x 10 KL		2 ORG X 10 KL	20	150.000	3.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.088-Jakarta III)					125.138.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Koordinasi dan Klarifikasi perbedaan penetapan tanggal lahir/nama/TMT CPNS, verifikasi dan validasi JKK JKM		1 PKT	1	125.138.000	125.138.000
	aSumatra Barat					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	380.000	1.140.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	3.332.000	6.664.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.952.000	2.952.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	380.000	1.140.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	701.000	1.402.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.952.000	2.952.000
	* Taxi PP		1 org x 2 kl	1	446.000	446.000
	b Bangka Belitung					

	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	410.000	1.230.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.838.000	5.676.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.129.000	2.129.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		1 org x 1 kl x 3 hr	3	410.000	1.230.000
	Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	622.000	1.244.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	2.129.000	2.129.000
	* Tiket PP		1 org x 2 kl	2	346.000	692.000
	* Taxi PP					
	c Sulawesi Utara					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.290.000	4.580.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	5.102.000	5.102.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		2 org x 1 kl x 3 hr	6	370.000	2.220.000
	Harian		2 org x 1 kl x 2 mlm	4	978.000	3.912.000
	* Penginapan		2 org x 1 kl	2	5.102.000	10.204.000
	* Tiket PP		2 org x 2 kl	4	394.000	1.576.000
	* Taxi PP					
	d Jawa Timur					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	410.000	1.230.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.007.000	4.014.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.674.000	2.674.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		2 org x 1 kl x 3 hr	6	410.000	2.460.000
	Harian		2 org x 1 kl x 2 mlm	4	814.000	3.256.000
	* Penginapan		2 org x 1 kl	2	2.674.000	5.348.000
	* Tiket PP		2 org x 2 kl	4	450.000	1.800.000
	* Taxi PP					
	eMaluku Utara					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	430.000	1.290.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	3.843.000	7.686.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	6.664.000	6.664.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		2 org x 1 kl x 3 hr	6	430.000	2.580.000
	Harian		2 org x 1 kl x 2 mlm	4	600.000	2.400.000
	* Penginapan		2 org x 1 kl	2	6.664.000	13.328.000
	* Tiket PP		2 org x 2 kl	4	471.000	1.884.000
	* Taxi PP					
	f Pekanbaru					
	JF/ESELON IV/PELAKSANA					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	852.000	1.704.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	3.016.000	3.016.000
	* Taxi PP		1 org x 2 kl	2	357.000	714.000

B	Penetapan/Permbangunan status Kepegawaian					73.388.000
521211	Belanja Bahan					3.388.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 22 ORG x 2 KL	22 ORG x 2	44	53.000		2.332.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 22 ORG x 2 KL	KL 22 ORG x 2 KL	44	24.000		1.056.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					70.000.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Koordinasi dan Klarifikasi penyelesaian permasalahan status dan kedudukan kepegawaian	1 PKT		70.000.000		70.000.000
	aNTB					
	Eselon II					
	* Uang Harian	1 org x 1 kl x 3 hr	3	440.000		1.320.000
	* Penginapan	1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.648.000		5.296.000
	* Tiket PP	1 org x 1 kl	1	3.038.000		3.038.000
	* Representasi	1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000		450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang	1 org x 1 kl x 3 hr	3	440.000		1.320.000
	Harian	1 org x 1 kl x 2 mlm	2	907.000		1.814.000
	* Penginapan	1 org x 1 kl	1	3.038.000		3.038.000
	* Tiket PP	1 org x 2 kl	2	487.000		974.000
	* Taxi PP					
	b Jawa Barat					
	Eselon II					
	* Uang Harian	1 org x 1 kl x 3 hr	3	430.000		1.290.000
	* Penginapan	1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.563.500		5.127.000
	* Tiket PP/ Bensin dan tol	1 org x 1 kl	1	600.000		600.000
	* Representasi	1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000		450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang	2 org x 1 kl x 3 hr	6	430.000		2.580.000
	Harian	2 org x 1 kl x 2 mlm	4	550.000		2.200.000
	* Penginapan	2 org x 2 kl	4	600.000		2.400.000
	* Tiket PP/ Bensin dan tol					
	d Sulawesi					
	Selatan Eselon II					
	* Uang Harian	1 org x 1 kl x 3 hr	3	430.000		1.290.000
	* Penginapan	1 org x 1 kl x 2 mlm	2	1.938.000		3.876.000
	* Tiket PP	1 org x 1 kl	1	3.829.000		3.829.000
	* Representasi	1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000		450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang	2 org x 1 kl x 3 hr	6	430.000		2.580.000
	Harian	2 org x 1 kl x 2 mlm	4	745.000		2.980.000
	* Penginapan	2 org x 1 kl	2	2.934.000		5.868.000
	* Tiket PP	2 org x 2 kl	4	422.000		1.688.000
	* Taxi PP					
	e Jogja					
	Eselon II					
	* Uang Harian	1 org x 1 kl x 3 hr	3	420.000		1.260.000
	* Penginapan	1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.695.000		5.390.000
	* Tiket PP	1 org x 1 kl	1	2.268.000		2.268.000
	* Representasi	1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000		450.000

	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		1 org x 1 kl x 3 hr	3	420.000	1.260.000
	Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	845.000	1.690.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	2.268.000	2.268.000
	* Tiket PP		1 org x 2 kl	2	478.000	956.000
	* Taxi PP					
052	Pelaksanaan					55.440.000
A	Sidang penetapan status dan kedudukan kepegawaian					55.440.000
521211	Belanja Bahan					55.440.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 30 ORG x 24 KL		30 ORG x 24	720	53.000	38.160.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 30 ORG x 24 KL		KL 30 ORG x	720	24.000	17.280.000
			24 KL			
053	Pelaporan					3.850.000
A	Evaluasi SOP Pelayanan Status dan Kedudukan kepegawaian					1.925.000
521211	Belanja Bahan					1.925.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 25 ORG x 1 KL		25 ORG x 1	25	53.000	1.325.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 25 ORG x 1 KL		KL 25 ORG x	25	24.000	600.000
			1 KL			
B	Evaluasi kegiatan dan anggaran kedepan bidang mutasi kepegawaian					1.925.000
521211	Belanja Bahan					1.925.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 25 ORG x 1 KL		25 ORG x 1	25	53.000	1.325.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 25 ORG x 1 KL		KL 25 ORG x	25	24.000	600.000
			1 KL			

1 KL

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
NOTA PERSETUJUAN CLTN
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 2024

Kode	Uraian Suboutpu/komponen/ subkomponen/de l	Volume Sub Ouput	Rincian Perhitungan		Harga satuan	Jumlah
				Sat Jum		
1	2	3	4 5		6	7
4846.BAB.010	Nota Persetujuan CLTN dan Per mbangan Teknis Pengak fan PNS	624 lembaga				126.098.000
051	Persiapan dan Perencanaan					11.550.000
A	Persiapan penetapan nota persetujuan CLTN					11.550.000
521211	Belanja Bahan					11.550.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 25 ORG x 6 KL		25 ORG x 6 KL	150	53.000	7.950.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 25 ORG x 6 KL		25 ORG x 6 KL	150	24.000	3.600.000
052	Pelaksanaan					106.848.000
A	TANPA SUB KOMPONEN					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					106.848.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyelesaian permasalahan Status dan kedudukan Kepegawaian		1 PKT	1	106.848.000	106.848.000
	a Kalimantan Selatan					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	380.000	1.140.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	3.316.000	6.632.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.895.000	2.895.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		1 org x 1 kl x 3 hr	3	380.000	1.140.000
	Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	697.000	1.394.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	2.895.000	2.895.000
	* Tiket PP		1 org x 2 kl	2	406.000	812.000
	* Taxi PP					
	b Bali					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	480.000	1.440.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	1.946.000	3.892.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	3.161.000	3.161.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		1 org x 1 kl x 3 hr	3	480.000	1.440.000
	Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	1.138.000	2.276.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	3.161.000	3.161.000
	* Tiket PP		1 org x 2 kl	2	445.000	890.000
	* Taxi PP					
	c Sumatra					
	Selatan Eselon					
	II		1 org x 1 kl x 3 hr	3	380.000	1.140.000
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	3.083.000	6.166.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	2.168.000	2.168.000
	* Tiket PP					

	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		1 org x 1 kl x 3 hr	3	380.000	1.140.000
	Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	861.000	1.722.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	2.168.000	2.168.000
	* Tiket PP		1 org x 2 kl	2	435.000	870.000
	* Taxi PP					
	d Jawa Tengah					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	1.850.000	3.700.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.182.000	2.182.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		2 org x 1 kl x 3 hr	6	370.000	2.220.000
	Harian		2 org x 1 kl x 2 mlm	4	600.000	2.400.000
	* Penginapan		2 org x 1 kl	2	2.182.000	4.364.000
	* Tiket PP		2 org x 2 kl	4	346.000	1.384.000
	* Taxi PP					
	e Sumatera					
	Utara Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	370.000	1.110.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.195.000	4.390.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	3.708.000	3.708.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		2 org x 1 kl x 3hr	6	370.000	2.220.000
	Harian		2 org x 1 kl x 2 mlm	4	699.000	2.796.000
	* Penginapan		2 org x 1 kl	2	3.708.000	7.416.000
	* Tiket PP		2 org x 2 kl	4	564.000	2.256.000
	* Taxi PP					
	f Jawa Timur					
	Eselon II					
	* Uang Harian		1 org x 1 kl x 3 hr	3	410.000	1.230.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	2.007.000	4.014.000
	* Tiket PP		1 org x 1 kl	1	2.674.000	2.674.000
	* Representa f		1 org x 1 kl x 3 hr	3	150.000	450.000
	JF/ESELON					
	IV/PELAKSANA * Uang		1 org x 1 kl x 3 hr	3	410.000	1.230.000
	Harian		1 org x 1 kl x 2 mlm	2	814.000	1.628.000
	* Penginapan		1 org x 1 kl	1	2.674.000	2.674.000
	* Tiket PP		1 org x 2 kl	2	450.000	900.000
	* Taxi PP					
053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan					7.700.000
A	Evaluasi terhadap penyelesaian permasalahan					7.700.000
521211	CLTN Belanja Bahan					7.700.000
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa 25 ORG x 4 KL		25 ORG x 4 KL	100	53.000	5.300.000
	- Biaya Snack Rapat Biasa 25 ORG x 4 KL		25 ORG x 4 KL	100	24.000	2.400.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
 ALOKASI Rp. 797,400,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN			797,400,000	
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN			797,400,000	
4846.AEA	Koordinasi[Base Line]	7.0 kegiatan		365,000,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR				
4846.AEA.00	Koordinasi Teknis Pelayanan Pensiun PNS dan Pejabat Negara	2.0 kegiatan		365,000,000	
1 051	Prencanaan dan Persiapan			3,080,000	U
A	Persiapan Pelaksanaan Rakornis			3,080,000	
521211	Belanja Bahan			3,080,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	24,00	960,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	0	2,120,000	
052	Pelaksanaan			361,920,000	U
A	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN		53,00	167,730,000	
521211	Belanja Bahan			24,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	-Seminar Kit	1.0 PKT	22,500,000	22,500,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2,800,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Honorarium Ketua Panitia [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	400,00	400,000	
	-Honorarium Sekretaris Panitia [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	0	300,000	
	-Honorarium Anggota Panitia [7 ORG x 1 KEG]	7.0 OK	300,00	2,100,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			2,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)			300,00	
	-Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			138,430,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Paket Fullday Eselon III ke bawah [90 ORG x 1 KEG]	90.0 OK	427,000	38,430,000	
	-Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
B	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN			151,500,000	
521211	Belanja Bahan			27,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-ATK dan Bahan Komputer -	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	Seminar Kit	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
 ALOKASI Rp. 797,400,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Honorarium Ketua Panitia [1 ORG x 1 KEG] -Honorarium Sekretaris Panitia [1 ORG x 1 KEG] -Honorarium Anggota Panitia [7 ORG x 1 KEG]	1.0 OK 1.0 OK 7.0 OK	400,00 0 300,00	2,800,000 400,000 300,000 2,100,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	0 300,00 1,000,000	2,000,000 2,000,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Paket Fullday Eselon III ke bawah [100 ORG x 1 KEG] -Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian Pembinaan dan Koordinasi Penetapan Pertek Pensiun PNS dan Janda/Dudanya	100.0 OK 1.0 PKT	297,000 90,000,000	119,700,000 29,700,00 0 90,000,000 42,690,000 0	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Pembinaan dan Koordinasi Penetapan Pensiun	1.0 PKT	42,690,000	42,690,000	RM
4846.BAB	<u>Pelayanan Publik kepada lembaga [Base Line]</u>	3204.0 Lembaga,	Unit Kerja, Hektar, Bidang	432,400,000	
4846.BAB.00	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara	624.0 Lembaga		414,660,000	U
3 051	Perencanaan dan Persiapan <u>Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya</u>			1,925,000 1,925,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 1 KALI] -Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [25 ORG x 1 KALI]	25.0 OK 25.0 OK	24,00 0	1,925,000 600,000 1,325,000	RM
052	Pelaksanaan <u>Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya</u>		53,00 0	356,190,000 72,100,000	U
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 12 KALI] -Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [25 ORG x 12 KALI]	300.0 OK 300.0 OK	24,00 0	23,100,000 7,200,000 15,900,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Bahan Komputer	1.0 PKT 1.0 PKT	0 45,000,000 4,000,000	49,000,000 45,000,000 4,000,000	RM
B	<u>Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pejabat Negara (Dubes LBBP)</u>			9,725,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
 ALOKASI Rp. 797,400,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD / CP (6)
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 1 KALI]	25.0 OK	24,00	600,000	RM
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [25 ORG x 1 KALI]	25.0 OK	0	1,325,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Bahan Komputer	1.0 PKT	7,000,000	7,000,000	RM
	-ATK	1.0 PKT	800,000	800,000	
C	<i>Pembinaan dan Koordinasi Penetapan Pertek Pensiun PNS dan Janda/Dudanya</i>			213,865,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Penyelesaian Permasalahan Penetapan Pensiun	1.0 PKT	204,865,000	204,865,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Dalam Kota [60 ORG x 1 KALI]	60.0 OK	150,000	9,000,000	RM
D	<i>Pemindaian Tata Naskah Pensiun/Pemusnahan Tata Naskah Pensiun Punah</i>			60,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 4 KALI]	100.0 OK	24,00	2,400,000	RM
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [25 ORG x 4 KALI]	100.0 OK	0	5,300,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es.1) [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	750,00	3,000,000	RM
	-Honorarium Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es.1) [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	0	2,800,000	
	-Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es.1) [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	700,00	2,600,000	
	-Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es.1) [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	0	2,400,000	
	-Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es.1) [1 ORG x 4 BLN]	80.0 OB	0	40,000,000	
053	<i>Sustiasasi/Evaluasi/ Pelaporan</i>		600,00	56,545,000	U
A	<i>Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya</i>		0	51,925,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [25 ORG x 1 KALI]	25.0 OK	500,00	1,925,000	RM
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [25 ORG x 1 KALI]	25.0 OK	0	1,325,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Monitoring Evaluasi Penetapan Pensiun PNS dan Janda/Dudanya	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
 ALOKASI Rp. 797,400,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Rapat Dalam Rangka Evaluasi Kinerja dan Anggaran di Lingkungan			4,620,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)			4,620,000	RM
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 3 KALI]	60.0 OK	24,00	1,440,00	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [20 ORG x 3 KALI]	60.0 OK	0	0	
4846.BAB.00	Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara dan dan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS	4.0 Lembaga	53,00	17,740,000	
9 052	Pelaksanaan		0	0	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,740,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)			3,080,000	RM
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	24,00	960,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA [20 ORG x 2 KALI]	40.0 OK	0	2,120,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.088-Jakarta III)		53,00	14,660,000	RM
	-Bahan Komputer	1.0 PKT	13,000,000	13,000,000	
	-ATK	1.0 PKT	1,660,000	1,660,000	

Catatan :1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Timur, 2 Januari 2024

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01)Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Rp.
 ALOKASI 3,600,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN			3,600,000,000	
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN			3,600,000,000	
4846.AEA	Koordinasi[Base Line]	7.0 kegiatan		3,056,670,000	
----- Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR -----					
4846.AEA.00	Koordinasi Teknis Pelayanan Penetapan NIP CASN dan Penetapan Kenaikan Pangkat	2.0 kegiatan		381,670,000	
2 051	Perencanaan dan Persiapan			3,080,000	U
A	Persiapan Pelaksanaan Rakornis			3,080,000	
521211	Belanja Bahan			3,080,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 20 ORG x 2 KALI -	40.0 OK	24,00	960,000	
	Makan Rapat Biasa D.K.I.JAKARTA 20 ORG x 2 KALI	40.0 OK	0	2,120,000	
052	Pelaksanaan		53,00	378,590,000	U
A	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian di Surabaya		0	173,900,000	
521211	Belanja Bahan			28,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	
	-Seminar Kit	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3,100,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Honorarium Ketua Panitia 1 ORG x 1 KEG	1.0 OK	400,00	400,000	
	-Honorarium Sekretaris Panitia 1 ORG x 1 KEG	1.0 OK	0	300,000	
	-Honorarium Anggota Panitia 7 ORG x 1 KEG	8.0 OK	300,00	2,400,000	
522151	Belanja Jasa Profesi		0	2,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)		300,00		
	-Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 1 ORG x 2 JAM	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			140,800,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Paket Fullday Eselon III ke bawah 100 ORG x 1 KEG	100.0 OK	408,000	40,800,000	
	-Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
B	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian di Banda Aceh			174,690,000	
521211	Belanja Bahan			23,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	
	-Seminar Kit	1.0 PKT	20,000,000	20,000,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1,900,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Honorarium Ketua Panitia 1 ORG x 1 KEG	1.0 OK	400,00	400,000	
	-Honorarium Sekretaris Panitia 1 ORG x 1 KEG -	1.0 OK	0	300,000	
	Honorarium Anggota Panitia 4 ORG x 1 KEG	4.0 OK	300,00	1,200,000	

0

300,00

0

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01)Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Rp.
 ALOKASI 3,600,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 1 ORG x 2 JAM	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Paket Fullday Eselon III ke bawah 70 ORG x 1 PKT	70.0 OK	397,000	27,790,000	RM
C	<u>Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian</u> -Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Penetapan NIP, Kenaikan Pangkat dan Mutasi Lainnya	1.0 PKT	120,000,000	120,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Pembinaan dan Koordinasi	1.0 PKT	30,000,000	30,000,000	RM
4846.AEA.00	Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian	1.0 kegiatan		2,675,000,000	U
4 051	Perencanaan dan Persiapan			141,580,000	
A	<i>Persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian</i>			141,580,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) >Rapat persiapan II			41,580,000	RM
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 40 ORG x 2 KEG X 1 KALI	80.0 OK	24,00	1,920,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 40 ORG x 2 KEG X 1 KALI	80.0 OK	0	4,240,000	
	-Rapat Finalisasi Persiapan	260.0 OK	53,00	6,240,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 130 ORG x 2 KEG X 1 KALI	260.0 OK	0	13,780,000	
	>Rapat persiapan I	200.0 OK	24,00	4,800,000	
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 40 ORG x 5 KEG X 1 KALI	200.0 OK	93,00	10,600,000	
524111	<u>-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 40 ORG x 5 KEG X 1 KALI</u>		53,00	100,000,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
052	<u>Pelaksanaan</u> -Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2,528,800,000	U
A	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional</i>			2,528,800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Seragam Panitia Rapat Koordinasi Nasional	1.0 PKT	80,000,000	80,000,000	RM
	-Snack Rapat Biasa Makkassar 70 ORG x 2 KEG X 2 KALI	280.0 OK	26,000	7,280,000	
	-Makan Rapat Biasa Makkassar 70 ORG x 2 KEG X 2 KALI	280.0 OK	56,000	15,680,000	
	-Plakat Awards	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01)Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Rp.
 ALOKASI 3,600,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Honorarium Narasumber Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya (2 org x 2 jam x 1 keg)	4.0 OJ	1,700,00	6,800,000	RM
	-Honorarium Narasumber PAKAR (3 org x 2 jam x 1 keg)	6.0 OJ	0	10,200,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)		1,700,00	1,883,790,000	RM
	-Belanja Jasa Event Organizer	1.0 PKT	1,883,790,000	1,883,790,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			425,050,000	RM
	-Perjalanan Dinas Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
	-Paket Fullday Eselon III ke bawah 50 ORG x 1 KEG	50.0 OK	397,000	19,850,000	U
	-Paket Fullday Eselon I,II ke bawah 400 ORG x 1 KEG	400.0 OK	513,000	205,200,000	
053	<u>Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan</u>			4,620,000	U
A	<u>Evaluasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional</u>			4,620,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,620,000	RM
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 60 ORG x 1 KEG X 1 KALI	60.0 OK	24,00	1,440,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 60 ORG x 1 KEG X 1 KALI	60.0 OK	0	3,180,000	U
4846.BAB	<u>Pelayanan Publik kepada lembaga [Base Line]</u>	3204.0 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	53,00	543,330,000	
			0		
4846.BAB.00	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR	80.0 Lembaga		149,980,00	U
1 051	Penetapan NIP			0	
A	Perencanaan dan Persiapan <u>Penetapan NIP CASN, PPPK, dan Kartu Istri / Suami</u>			124,570,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			0 4,620,000	RM
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 2 KALI	60.0 OK	24,00	1,440,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 30 ORG x 2 KALI	60.0 OK	0	3,180,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)		53,00	53,000,000	
	-Bahan Komputer	1.0 PKT	25,000,000	25,000,00	RM
	-ATK	2.0 PKT	5,000,000	0	
	-Cetakan Kartu Istri / Suami	2.0 PKT	9,000,000	10,000,00	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			0 18,000,00	
	-Perjalanan Dinas Koordinasi, Pembinaan dan Konsultasi	1.0 PKT	65,000,000	65,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			65,000,000 1,950,000	
	-Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.0 OK	150,000	1,950,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01)Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Rp.
 ALOKASI 3,600,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pelaksanaan			25,410,000	U
A	Penetapan NIP CASN, PPPK, dan Kartu Istri / Suami			25,410,000	
521211	Belanja Bahan			25,410,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 11 KALI	330.0 OK	24,00	7,920,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 30 ORG x 11 KALI	330.0 OK	0	17,490,000	
4846.BAB.00	Penetapan Kenaikan Pangkat	624.0 Lembaga	53,00	329,180,000	
2 051	Perencanaan dan Persiapan			6,930,000	U
A	Penetapan Kenaikan Pangkat			6,930,000	
521211	Belanja Bahan			6,930,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 3 KALI -	90.0 OK	24,00	2,160,000	
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 30 ORG x 3 KALI	90.0 OK	0	0	
052	Pelaksanaan		53,00	329,270,000	U
A	Penetapan Kenaikan Pangkat		0	139,220,000	
521211	Belanja Bahan			27,720,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 12 KALI	360.0 OK	24,00	8,640,000	
	-Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 30 ORG x 12 KALI	360.0 OK	0	19,080,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		53,00	35,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)		0		
	-Bahan Komputer	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000	
	-ATK	2.0 PKT	5,000,000	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)			0	
	-Perjalanan Dinas Koordinasi, Pembinaan dan Konsultasi	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.0 OK	150,000	1,500,000	
B	Penetapan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Periode I II			183,030,000	
521211	Belanja Bahan			48,850,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	-ATK dan Bahan Komputer	2.0 PKT	4,005,000	8,010,000	
	-Seminar Kit	2.0 PKT	15,000,000	30,000,000	
	-Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 4 KALI -	120.0 OK	24,000	2,880,000	
	Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 30 ORG x 4 KALI	120.0 OK	53,000	6,360,000	
	-Spanduk	4.0 BUAH	400,000	1,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 UNIT ORG (01)Badan Kepegawaian Negara
 UNIT KERJA (017220)BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Rp.
 ALOKASI 3,600,000,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUANJUAL	JMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Honorarium Ketua Panitia 1 ORG x 2 KEG -Honorarium Sekretaris Panitia 1 ORG x 2 KEG -Honorarium Anggota Panitia 5 ORG x 2 KEG	2.0 OK 2.0 OK 10.0 OK	400,00 0 300,00	4,400,000 800,000 600,000 3,000,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Paket Fullday Eselon III ke bawah 60 ORG x 2 KEG -Paket Fullboard Eselon III ke bawah 20 ORG x 2 KEG -Uang Transport Internal (30 Org X 2 KEG) -Uang Harian Fullday (15 Org X 2 KEG X 1 HR) -Uang Harian Fullboard (20 Org X 2 KEG X 2 HR)	120.0 OK 40.0 OK 60.0 OK 30.0 OK 80.0 OK	0 300,00 455,000 1,197,000 150,000 130,000 180,000	0 129,780,000 54,600,000 47,880,000 9,000,000 3,900,000 14,400,000	RM
4846.BAB.00	Penetapan Mutasi Lainnya	624.0 Lembaga		64,170,000	
8 051	Perencanaan dan Persiapan			4,620,000	U
A	<i>Persiapan Penetapan Mutasi Lainnya</i>			4,620,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 2 KALI - Makan Rapat Biasa D.K.I.JAKARTA 30 ORG x 2 KALI	60.0 OK 60.0 OK	24,00 0	1,440,00 0	RM
052	Pelaksanaan		53,00	59,530,000	U
A	<i>Pelaksanaan Penetapan Mutasi Lainnya</i>		0	59,550,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 30 ORG x 5 KALI -Makan Rapat Biasa D.K.I.JAKARTA 30 ORG x 5 KALI	150.0 OK 150.0 OK	24,00 0	3,600,000 7,950,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Bahan Komputer	1.0 PKT	15,000,000	15,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Koordinasi, Pembinaan dan Konsultasi	1.0 PKT	30,000,000	90,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) -Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.0 OK	150,000	3,000,000	RM

Catatan :1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Timur, 20 Desember 2023

Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, M.AP
 NIP. 196605091986032001